



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Panut Mulyono
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 401345

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 13.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 519 m²/243 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 474 m²/72 m² di SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 39.7 m²/31.6 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 334.000.000

1. MOBIL, Honda CR-V REI 2 WD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, Honda JAZZ GE 815 F AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, Honda SPD MOTOR SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 85.850.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 932.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.025.464.764

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 20.527.314.764

III. HUTANG Rp. 589.560.922

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 19.937.753.842

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.